

Pengaruh Intergovernmental Revenue dan Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera Utara Tahun 2021–2023

The Influence of Intergovernmental Revenue and Regional Government Wealth on the Financial Performance of Local Governments in North Sumatra for the Years 2021–2023

Rahmadiyah Syafitri^a, Sucitra Dewi^{b*}, Fauziah Rahman^c

Universitas Medan Area^{a,b,c}
sucitra@staff.uma.ac.id^b

Abstract

This research aimed to determine the effect of intergovernmental revenue and regional government wealth on the financial performance of regional governments in the North Sumatra region from 2021 to 2023. This research used secondary data, which were obtained from the financial reports of regional governments in the North Sumatra region through www.ppid.kemenkeu.go.id or through the available PPID application. The population in this research was the financial reports of 33 districts/cities in North Sumatra for the period 2021–2023. A saturated sampling technique was used to take the samples in this research. The research sample was 33 districts/cities in North Sumatra that met the criteria. The data analysis technique in this research used panel data regression. The results of this research showed that intergovernmental revenue had a positive and significant effect on financial performance, regional government wealth had a negative and significant effect on financial performance, while the simultaneous test showed that intergovernmental revenue and regional government wealth simultaneously had a significant effect on the financial performance of the district/city governments in the Province of North Sumatra.

Keywords: *Intergovernmental Revenue, Regional Government Wealth, Financial Performance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *intergovernmental revenue* dan kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder ini diperoleh dari data laporan keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara melalui www.ppid.kemenkeu.go.id atau melalui aplikasi PPID yang tersedia. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera Utara sebanyak 33 kabupaten/kota periode tahun 2021-2023. Teknik sampel jenuh digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini. Sampel penelitian ini adalah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria yaitu sebanyak 33 kabupaten/kota Sumatera Utara. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, kekayaan pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* dan kekayaan pemerintah daerah secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: *Intergovernmental Revenue, Kekayaan Pemerintah Daerah, Kinerja Keuangan.*

1. Pendahuluan

Setiap Negara mengatur perekonomian dengan menggunakan anggaran sebagai pedoman dalam mengelola kegiatan ekonomi. Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau sehingga dalam melaksanakan perekonomian memerlukan sebuah anggaran. Anggaran merupakan rancangan kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dengan satuan moneter (Sujarweni 2022). Mewujudkan perekonomian yang merata setiap daerah, Indonesia memakai asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan kebijakan guna pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya dari pusat ke daerah sehingga daerah dapat langsung melaksanakan program dan pelayanan. Hak yang dimiliki pemerintah daerah atas pengolahan sumber daya daerahnya dan mengelola dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebut Asas Desentralisasi (BPK RI 2014).

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu: Nilai Unitaris dan Nilai dasar Desentralisasi Teritorial. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, bahwa setiap daerah diberi kesempatan dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintah daerah yang baik.

Pemerintahan merupakan organisasi sektor publik sehingga anggaran yang dibentuk merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi guna memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemilik dan pelaksanaan tersebut dibiayai dengan uang publik. Oleh karena itu, organisasi sektor publik juga memerlukan perbaikan kinerja yang terukur ketika dana yang dialokasikan kepada daerah akan diproses dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD dinilai sebagai laporan yang kredibel karena memuat informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan ataupun kebijakan dalam pemerintahan. Untuk melihat kemampuan daerah menjalankan otonomi daerah dapat menggunakan kinerja keuangan sebagai salah satu pengukuran (Patarai 2017).

Kinerja keuangan merupakan hasil kerja atau perbandingan secara kualitas dan kuantitas baik yang bersifat fisik maupun non fisik menyangkut keuangan baik meliputi penghimpunan dan penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dalam meningkatkan kinerja. Kinerja keuangan merupakan tindakan analisa yang dilakukan guna melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Fahmi 2018). Dengan adanya publikasi tentang hasil laporan keuangan maka masyarakat akan mengetahui bagaimana kinerja pemerintah daerah menjalankan tugasnya, karena masih banyak masyarakat yang merasakan perkembangan daerahnya tidak berjalan dengan baik (Satria and Sari 2018).

Pada hakikatnya, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya sebagai bentuk pengendalian, namun juga sebagai evaluasi terhadap tingkat efisiensi dalam kegiatan pemerintahan serta memantau perbedaan antara biaya yang diperkirakan dengan biaya yang sebenarnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjabarkan definisi dari pajak daerah yang merupakan suatu bentuk kontribusi wajib yang terhutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang guna keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pajak daerah menjadi salah satu sumber penting yang akan berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika pendapatan pajak daerah tinggi atau sesuai dengan target yang ditetapkan maka akan menunjukkan kinerja keuangan yang bagus pada daerah tersebut.

Menilai kinerja keuangan suatu daerah dapat dilihat dari dana perimbangan atau *intergovernmental revenue* dan melalui kekayaan yang dimiliki daerah. *Intergovernmental revenue* atau yang biasa disebut sebagai dana perimbangan (Suhardjanto, et al. 2010). Pendapatan yang diterima pemerintah daerah berasal dari sumber eksternal atau disebut sebagai *intergovernmental revenue* tidak diperlukan pembayaran kembali (Patrick 2007). Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dalam melaksanakan asas desentralisasi demi keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Menurut PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara dari sektor pajak daerah per 20 November 2023 baru mencapai 77,54%. Artinya, baru sekitar Rp5,76 triliun yang terceruk dari target pendapatan pajak daerah Sumatera Utara yang ditetapkan sebesar Rp7,43 triliun. Dibawah ini terdapat tabel PAD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 2021-2023:

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tahun 2021-2023 (dalam miliar rupiah).

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Kenaikan/Penurunan PAD (%)
2020	5.077,07	-
2021	5.659,15	10,29%
2022	5.906,23	4,18%
2023	6.513,26	9,32%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), (Data Diolah, 2024) □

Pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 10,29% dari tahun 2020. Pada tahun 2022 PAD kembali mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021, namun tingkat kenaikannya hanya 4,18%. Pada tahun 2023 PAD juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 9,32%, namun kenaikan tersebut masih lebih rendah dari kenaikan tahun 2021. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan penerimaan pendapatan dari setiap kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, adanya kenaikan juga penurunan terhadap pendapatan penerimaan pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dikarenakan hal tersebut pemerintah provinsi Sumatera Utara melakukan berbagai cara untuk menambah pendapatan daerah yaitu dengan meningkatkan penetapan regulasi, dan kebijakan yang tepat guna mengoptimalkan PAD.

Tingkat keberhasilan otonomi suatu daerah dinilai dari Pendapatan Asli Daerah, namun kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang dikenal sebagai dana perimbangan. Pada penelitian terdahulu ditemukan bahwa terdapat pengaruh negatif *intergovernmental revenue* secara parsial dan signifikan terhadap kinerja keuangan (Iswantini, Hirmantono and Natalia 2021). Hal tersebut sejalan dengan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (Putri and Darmayanti 2019). *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian (Nugroho and Praestyo 2018). Namun berbeda dengan hasil pada penelitian selanjutnya bahwa tidak adanya pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Achmad, Septiyanti and Metalia 2017).

Perhitungan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dihitung dari tingkat efisiensi suatu daerah dalam mengelola dana pendapatan asli daerah untuk belanja pegawai dan belanja barang daerah tersebut. Selain hal tersebut, tingkat dari *Intergovernmental Revenue* dan Kekayaan Daerah kerap dijadikan acuan dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Dibawah ini disajikan data realisasi Belanja Operasi dan realisasi PAD pada kabupaten/kota Sumatera Utara tahun 2021-2023

Tabel 1. Realisasi Belanja Operasi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2021 (miliar rupiah)		Tahun 2022 (miliar rupiah)		Tahun 2023 (miliar rupiah)	
		Realisasi Belanja Operasi	Realisasi PAD	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi PAD	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi PAD
1	Kab. Asahan	1.126.624.246.188	134.864.406.995	1.131.016.806.164	157.521.134.076	1.200.173.958.437	169.326.017.625
2	Kab. Dairi	757.204.880.990	72.268.890.301	757.712.293.114	84.618.675.421	844.293.304.488	85.084.763.844
3	Kab. Deli Serdang	2.424.674.840.910	926.137.759.153	2.641.351.472.407	1.041.668.145.481	2.761.423.726.370	1.048.080.443.589
4	Kab. Karo	896.003.961.283	108.359.804.241	925.618.228.805	97.474.399.999	934.206.103.692	103.440.404.583
5	Kab. Labuhanbatu	960.442.859.433	238.194.215.394	967.785.136.299	184.403.843.932	1.021.869.546.656	204.630.088.161
6	Kab. Langkat	1.539.110.261.048	158.480.919.772	1.579.488.241.699	140.628.891.267	1.659.647.305.369	255.321.768.506
7	Kab. Mandailing Natal	1.020.902.139.554	142.409.606.087	1.027.255.894.675	93.998.645.256	1.133.825.712.541	124.677.017.400
8	Kab. Nias	514.909.343.403	103.944.559.551	529.525.658.952	96.013.311.708	564.267.230.303	121.549.175.855
9	Kab. Simalungun	1.406.668.512.878	177.646.004.174	1.442.122.042.598	158.095.359.457	1.516.114.211.151	170.619.769.576
10	Kab. Tapanuli Selatan	792.868.270.476	134.093.420.731	894.848.100.986	129.502.685.760	1.058.572.729.835	162.812.997.010
11	Kab. Tapanuli Tengah	768.058.776.859	84.473.837.625	755.559.464.595	75.256.684.012	817.906.120.669	79.065.207.857
12	Kab. Tapanuli Utara	918.034.972.260	162.791.620.432	862.090.696.072	145.689.119.621	927.720.435.846	134.848.617.519
13	Kab. Toba	639.786.910.162	75.305.600.200	641.908.469.494	73.220.848.674	723.948.363.074	90.456.753.553
14	Kota Binjai	738.823.635.638	91.986.343.406	781.911.275.779	107.762.359.865	790.902.077.346	113.119.618.444
15	Kota Medan	3.833.501.098.375	1.906.512.189.047	4.411.464.936.830	2.230.554.495.747	4.788.957.849.977	2.442.782.732.669
16	Kota Pematang Siantar	717.400.766.739	137.849.088.370	738.303.068.493	154.210.931.232	788.884.206.660	141.077.643.335
17	Kota Sibolga	481.221.646.923	76.263.787.133	555.581.327.682	82.398.151.034	609.192.245.705	87.004.057.222
18	Kota Tanjung Balai	523.210.868.088	58.650.167.941	547.656.146.195	54.088.438.648	586.583.190.959	74.374.497.357
19	Kota Tebing Tinggi	498.357.709.828	82.930.324.048	547.949.669.191	88.746.827.290	560.131.637.878	97.310.116.162
20	Kota Padang Sidempuan	606.518.529.014	59.865.657.758	645.045.218.934	63.144.333.001	689.135.535.674	68.453.806.606
21	Kab. Pakpak Bharat	364.406.390.933	24.443.194.479	360.727.614.855	18.005.084.566	393.743.129.826	20.624.024.881
22	Kab. Nias Selatan	687.216.771.606	32.822.654.372	654.207.605.051	29.355.548.731	728.592.793.890	25.439.122.674
23	Kab. Humbang Hasundutan	618.162.640.162	26.917.795.029	647.724.734.126	65.324.668.195	666.196.662.043	68.332.187.469
24	Kab. Serdang Bedagai	941.965.858.385	133.466.455.515	1.053.165.227.998	117.658.930.319	1.018.555.673.755	151.087.092.665
25	Kab. Samosir	516.363.895.207	61.871.566.524	510.047.658.193	63.698.152.720	575.587.453.364	69.628.488.029
26	Kab. Batu Bara	788.535.676.107	174.549.720.181	796.745.938.086	109.336.570.850	834.588.248.911	134.794.666.811
27	Kab. Padang Lawas	633.718.870.021	46.759.858.387	580.203.496.511	46.926.773.423	629.432.980.886	44.195.197.316
28	Kab. Padang Lawas Utara	608.059.186.341	43.312.600.311	658.900.225.153	43.152.592.302	685.665.882.991	46.884.394.366
29	Kab. Labuhanbatu Selatan	587.612.223.925	63.254.710.984	586.193.713.980	53.150.702.676	647.504.326.057	61.081.576.642
30	Kab. Labuhanbatu Utara	687.356.462.423	58.863.185.741	692.803.025.068	50.652.416.193	771.467.950.069	57.224.029.259
31	Kab. Nias Utara	426.157.668.324	20.175.811.945	456.289.860.273	12.084.292.975	506.011.981.682	16.951.900.600
32	Kab. Nias Barat	394.017.700.357	18.267.918.507	431.614.721.260	12.655.553.070	471.984.595.509	15.588.182.641
33	Kota Gunungsitoli	413.474.510.675	21.417.950.730	425.431.833.527	25.231.747.566	500.943.824.969	27.398.988.049
Total		28.831.372.084.516	5.659.151.625.067	30.238.249.803.042	5.906.230.315.068	32.408.030.996.582	6.513.265.348.275

Sumber: Diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 terjadi kenaikan nilai pendapatan asli daerah di 11 kabupaten/kota wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023, sementara terdapat 19 kabupaten/kota nilai pendapatan asli daerah tidak stabil yang mengalami penurunan pada tahun 2022 dan kenaikan pada tahun 2023, dan terdapat 3 kabupaten/kota lainnya yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah dari tahun 2021-2023.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara antara lain: (1) Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah; (2) Masih rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber PAD yang tercermin dari penerimaan PAD yang relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer (*Intergovernmental Revenue*); (3) Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada (Kusufi and M. 2013).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dasmara dan Basri (2020) menemukan bahwa semakin besar nilai *intergovernmental revenue* dan kekayaan daerah maka akan semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Darmayanti (2019) yang menemukan bahwa jika kekayaan suatu daerah mengalami kenaikan secara signifikan maka akan berpengaruh pada kinerja keuangan daerah sebab besar atau kecilnya penerimaan dana perimbangan sangat mempengaruhi kinerja keuangan.

Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan yang tinggi menjadikan daerah tersebut tidak memiliki kewenangan dan kebebasan dalam hal penggunaan sumber pendapatan sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit tercapai jika pemerintah daerah masih bergantung pada dana perimbangan. Menurut Mardiasmo (2004:155), yang harus dipahami adalah bahwa kewenangan yang dimiliki daerah tidak sebatas dalam menggunakan PAD saja, tetapi juga kewenangan dalam penggunaan dana perimbangan.

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mustikarini and Fitriyani 2012). Berdasarkan pasal 1 UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Sumber dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah. PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif sesuai kebutuhan pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati, et al. 2012). Dengan lancarnya penyelenggaraan urusan daerah maka Pemda akan memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Sebagai pertimbangan dari penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk membawa penelitian dengan judul "Pengaruh *Intergovernmental Revenue* dan Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera Utara tahun 2021-2023.

2. Metode

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intergovernmental revenue dan kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2021–2023.

Objek dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang telah diaudit oleh BPK RI pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2024.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu satu variabel dependen dan dua variabel independen sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan daerah (variabel dependen), diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah (total PAD dibagi total pendapatan).
2. Intergovernmental revenue (variabel independen), diukur dengan rasio dana transfer (jumlah dana transfer dari pemerintah pusat dibagi total pendapatan).
3. Kekayaan pemerintah daerah (variabel independen), diukur dengan total aset tetap.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 33 daerah. Sampel yang digunakan sebanyak 29 kabupaten/kota yang memiliki data laporan keuangan lengkap selama tahun 2021 hingga 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK RI, serta data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan aplikasi Eviews. Tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data masing-masing variabel seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi.
- b. Uji Chow untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model dengan Fixed Effect Model.
- c. Uji Hausman untuk memilih model terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model.
- d. Uji asumsi klasik:
 - Uji normalitas menggunakan metode Jarque-Bera. Data dianggap normal jika nilai probabilitas $> 0,05$.
 - Uji multikolinearitas untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel independen. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai VIF < 10 dan tolerance $> 0,1$.

- Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai probabilitas > 0,05.
- Uji autokorelasi menggunakan nilai Durbin-Watson. Nilai DW mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi.
- Analisis regresi data panel dengan model:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Kinerja keuangan daerah ke-i pada tahun ke-t

X_{1it} = Intergovernmental revenue

X_{2it} = Kekayaan pemerintah daerah

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

ε_{it} = Error

- Uji hipotesis:
 - Uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
 - Uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.
 - Koefisien determinasi (R^2) untuk melihat seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

3. Hasil Dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data diri dari variabel independen yaitu *intergovernmental revenue* dan kekayaan daerah serta variabel dependen berupa kinerja keuangan pemerintah daerah Sumatera Utara. Data dari statistik deskriptif disajikan dalam bentuk tabel statistik deskriptif (*descriptive statistic*) yang akan menguraikan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standart deviasi.

Tabel 2. Analisis Deskriptif

	<i>Intergovernmental Revenue</i>	<i>Kekayaan Pemerintah Daerah</i>	<i>Kinerja Keuangan</i>
Mean	6740.357	8237.936	9.910827
Median	6602.000	8445.000	7.960036
Maximum	9919.000	9473.000	42.09000
Minimum	4441.000	3839.000	1.620000
Std. Dev.	1088.949	1005.399	7.769099
Skewness	0.519369	-2.946933	2.736294
Kurtosis	3.049629	11.294744	9.828580
Jarque-Bera	3.947269	330.04845	236.8253
Probability	0.147374	0.000000	0.000000
Sum	593984.0	716643.0	862.3214
Sum Sq. Dev.	1.01E+09	86979884	5190.824
Observations	99	99	99

Sumber: Data Primer, diolah dengan Eviews 10.0, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki rata-rata antara 6740,357 sampai dengan 9,910827, setiap variabel memiliki nilai minimum antara 1,6200 sampai dengan 4441,00, nilai maksimum antara 42,09 sampai dengan 9919,00. Untuk nilai sum pada masing-masing variabel yaitu antara 862,3214 sampai dengan 716643,0 dan nilai standar deviasi antara 7,769099 sampai dengan 1088,949,00. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap variabel berkategori rata-rata baik.

Pemilihan Model Regresi

Regresi data panel memiliki gabungan karakteristik yaitu data yang terdiri atas beberapa objek dan meliputi waktu. Data semacam ini memiliki keunggulan terutama karena bersifat *robust* (kuat) terhadap beberapa tipe pelanggaran yakni heterokedastisitas dan normalitas. Regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model yaitu *pooled*, *fixed effect* dan *random effect*. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan model tergantung pada asumsi yang dipakai dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistik yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Oleh karena itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih model dari ketiga yang tersedia. Data panel yang telah dikumpulkan, diregresikan dengan menggunakan metode *pooled* yang hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Regresi data panel dengan common effect PLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	31.83689	5.477937	5.364748	0.0000
Intergovernmental Revenue	0.000165	0.000968	0.678476	0.5082
Kekayaan Pemenintah Daerah	-0.008383	0.000697	-4.423577	0.0000
Effects Specification				
R-squared	0.984757	Mean dependent var	9.910288	
Adjusted R-squared	0.984099	S.D. dependent var	6.763564	
S.E. of regression	0.981665	Akaike info criterion	3.443528	
Sum squared resid	53.89400	Schwarz criterion	3.950884	
Log likelihood	-102.6887	Hannan-Quinn criter.	2.235358	
F-statistic	177.9185	Durbin-Watson stat	2.336689	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Primer, diolah dengan Eviews 10.0, 2024

Tabel 4. Regresi data panel dengan Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	32.93685	5.537353	5.925734	0.0000
INTERGOVERNMENTAL_REVENUE	0.000945	0.000840	0.839527	0.5029
KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH	-0.002974	0.000924	-4.856436	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.984735	Mean dependent var	9.463787	
Adjusted R-squared	0.983565	S.D. dependent var	7.769884	
S.E. of regression	0.987485	Akaike info criterion	3.071245	
Sum squared resid	53.89464	Schwarz criterion	3.950387	
Log likelihood	-102.2447	Hannan-Quinn criter.	3.423643	
F-statistic	177.4654	Durbin-Watson stat	2.690089	
Prob(F-statistic)	0.000000			0.000000

Sumber: Data Primer, diolah dengan Eviews 10.0, 2024

Setelah hasil dari model *common effect* dan *fixed effect* diperoleh maka selanjutnya dilakukan uji chow. Pengujian tersebut dibutuhkan untuk memilih model yang paling tepat diantara model *common effect* dan *fixed effect*.

Uji Chow

Hasil dari uji chow dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	9.568574	(2.36)	0.0000
Cross-section chi-square	110.817997	2	0.0000

Sumber: Data Primer, diolah dengan Eviews 10.0, 2024

Hasil dari uji *chow* pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section* adalah 0,0000 atau $<0,05$, maka H_0 ditolak. Oleh karena itu model yang dipilih adalah *fixed effect*.

Uji Hausman

Tabel 6. Hausman Test

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	45.626782	2	0.0000

Sumber: Data Primer, diolah dengan Eviews 10.0, 2024

Berdasarkan hasil uji hausman di atas, dapat dilihat dari nilai probabilitas Cross-section random yakni sebesar 0,0000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga model yang dipilih yakni *fixed effect model* (FEM).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendapatkan model regresi yang baik dan benar-benar memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Priyatno 2022). Uji normalitas dengan analisis uji statistik yang digunakan adalah nilai probabilitas dengan hipotesis sebagai berikut:

$> 0,05$ = Residual berdistribusi Normal

$< 0,05$ = Residual tidak berdistribusi Normal

Tabel 7. Uji Normalitas

Jarque-Bera	3.947269
Probability	0.147374

Sumber: Data Primer, diolah dengan Eviews 10.0, 2024

Pada gambar di atas dapat dilihat dimana variabel residual yang distandarkan mempunyai nilai probabilitasnya sebesar 0,147374 lebih besar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengganggu (residual) pada setiap variabel adalah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen) (Priyatno 2022). Efek dari multikoloniaritas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan

bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi oleh variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *Tolerance* (TOL) dengan metode *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah nilai $VIF < 10$. Apabila nilai $VIF > 10$ maka terdapat multikolinearitas (Priyatno 2022).

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
Intergovernmental Revenue	47.355673	139.8684	1.342580
Kekayaan Pemerintah Daerah	6.474696	11.66475	1.569943
C	2.554560	1637.079	NA

Sumber: Data Primer, diolah dengan Eviews 10.0, 2024

Berdasarkan pengujian terhadap nilai koefisien korelasi di atas, variabel *Intergovernmental Revenue* mempunyai nilai $VIF 1,342580 < 10$ dan variabel Kekayaan Daerah memiliki nilai VIF sebesar $1,569943 < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Priyatno 2022). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji glejser. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan ada tidaknya masalah heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *Probability Chi-square* lebih kecil dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga disimpulkan ada masalah heteroskedastisitas.
2. Jika nilai *Probability Chi-square* lebih besar dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	5.000459	Prob. F	0.0059
Obs*R-squared	55.46579	Prob. Chi-square	0.4253
Scaled explained SS	242.0046	Prob. Chi-square	0.8857

Sumber: Data Primer, diolah dengan Eviews 10.0, 2024

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan nilai *p-value* Obs*R-squared $0,4253 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima artinya tidak ada heteroskedastisitas atau data sudah bersifat homogen.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan keadaan terjadinya korelasi antara residual tahun ini dengan tingkat kesalahan tahun sebelumnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengkaji apakah suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $(t-1)$. Jika terjadi korelasi maka disebut dengan masalah autokorelasi. Menurut (Priyatno 2022), model regresi terbaik adalah regresi yang terbebas dari masalah autokorelasi.

Perhitungan uji autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* (Priyatno 2022).

Hipotesis:

H_0 : Tidak ada masalah autokorelasi
 H_1 : Ada masalah autokorelasi
 Probabilitas < Alpha (0.05), H_0 ditolak, H_1 diterima
 Probabilitas > Alpha (0.05), H_1 ditolak, H_0 diterima
 Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	177.4654	Prob. F	0.8477
Obs*R-squared	46.84789	Prob. Chi-square	0.08005

Sumber: Data Primer, diolah dengan Eviews 10.0, 2024

Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas menunjukkan nilai p-value Obs*R-squared 0,08005 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi masalah autokorelasi pada model tersebut.

Regresi Data Panel

Penggunaan data panel dalam penelitian ini karena terdapat rentang waktu beberapa tahun dan banyaknya objek kabupaten/kota wilayah Sumatera Utara. Penggunaan data *time series* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu rentang waktu tiga tahun dari tahun 2021-2023. Kemudian penggunaan *cross section* karena pengambilan data diambil dari 33 kabupaten/kota wilayah Sumatera Utara yang memiliki Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli yang dijadikan sebagai sampel penelitian.

$$\text{Kinerja Keuangan} = 69.85579 + 0.000922 * \text{Intergovernmental Revenue} - 0.007886 * \text{Kekayaan Pemerintah Daerah}$$

Keterangan persamaan di atas :

$\alpha = 69,85579$; artinya tanpa adanya pengaruh *intergovernmental revenue* dan kekayaan pemerintah daerah, maka kinerja keuangan sudah ada sebesar 69,85 persen.

$c_1 = 0,000922$; artinya bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel *intergovernmental revenue* (X_1) terhadap kinerja keuangan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin naik atau meningkatnya *intergovernmental revenue*, maka akan meningkatkan kinerja keuangan. Nilai koefisien regresi *intergovernmental revenue* adalah 0,000922 artinya setiap peningkatan satu satuan *intergovernmental revenue* maka kinerja keuangan meningkat sebesar 0,09 persen.

$c_2 = -0,007886$; artinya bahwa terdapat pengaruh negatif antara variabel kekayaan pemerintah daerah (X_2) terhadap kinerja keuangan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin naik atau meningkatnya kekayaan pemerintah daerah, maka akan menurunkan kinerja keuangan. Nilai koefisien regresi kekayaan pemerintah daerah adalah -0,007886 artinya setiap peningkatan satu satuan kekayaan pemerintah maka kinerja keuangan menurun sebesar 0,78 persen.

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji signifikansi parameter individual (uji parsial t), uji f (uji simultan), uji koefisien regresi, dan uji determinasi.

Uji Signifikansi (Uji Parsial)

Uji beda *t-test* digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan

dalam uji t adalah sebagai berikut, jika nilai profitabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak sehingga variabel tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai profitabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima sehingga variabel berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	69.85579	2.690489	28.936793	0.0000
Intergovernmental Revenue	0.000922	0.000357	2.464678	0.0005
Kekayaan Pemerintah Daerah	-0.007886	0.000443	-4.93679	0.0000

Sumber: Data Primer, diolah dengan Eviews 10.0, 2024

1. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil analisis pengaruh variabel *intergovernmental revenue* (X_1) terhadap variabel kinerja keuangan (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,464678$ ($df = 99 - 3 = 96$; $t_{tabel} = 1,98498$); ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dengan tingkat level signifikan $0,0005 < 0,05$, dengan nilai koefisien sebesar 0,000922, akibatnya hipotesis satu (H_1) diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan.

2. Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil analisis pengaruh variabel kekayaan pemerintah daerah (X_2) terhadap variabel kinerja keuangan (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 4,93679$ ($df = 99 - 3 = 96$; $t_{tabel} = 1,98498$); ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dengan tingkat level signifikan $0,0000 < 0,05$, dengan nilai koefisiensi sebesar -0,007886, akibatnya hipotesis dua (H_2) diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan.

Uji F (Uji Simultan)

Uji beda *F-test* digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan dalam menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut, jika nilai profitabilitas signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis ditolak sehingga variabel tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai profitabilitas signifikansi $< 0,05$, maka hipotesis diterima sehingga variabel berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 11. Hasil Uji F

R-squared	0.951737	Mean dependent var	9.463787
Adjusted R-squared	0.950365	S.D. dependent var	7.769884
S.E. of regression	1.739580	Akaike info criterion	3.973680
Sum squared resid	252.9478	Schwarz criterion	3.057780
Log likelihood	-169.3453	Hannan-Quinn criter.	4.004787
F-statistic	875.8467	Durbin-Watson stat	1.846737
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Primer, diolah dengan Eviews 10.0, 2024

Hasil analisis pengaruh variabel *intergovernmental revenue* (X_1) dan kekayaan pemerintah daerah (X_2) terhadap variabel kinerja keuangan (Y) diperoleh nilai $F_{hitung} = 875,8467$ ($df = 99 - 3 = 96$; $F_{tabel} = 3,09$); ($F_{hitung} > F_{tabel}$), dengan tingkat level signifikan

0,0000 < 0,05, akibatnya hipotesis tiga (H_3) diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *intergovernmental revenue* dan kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan.

Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 merupakan pengukuran kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Priyatno 2022). R^2 menyatakan koefisien determinasi atau seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R^2) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1.

Tabel 11. Hasil Uji R Square

R-squared	0.951737	Mean dependent var	9.463787
Adjusted R-squared	0.950365	S.D. dependent var	7.769884
S.E. of regression	1.739580	Akaike info criterion	3.973680
Sum squared resid	252.9478	Schwarz criterion	3.057780
Log likelihood	-169.3453	Hannan-Quinn criter.	4.004787
F-statistic	875.8467	Durbin-Watson stat	1.846737
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Primer, diolah dengan Eviews 10.0, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai R-square sebesar 0,951737 artinya 95,1737 persen variasi dari semua variabel bebas dapat menerangkan variabel tak bebas, sedangkan sisanya sebesar 4,86263 persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

Pembahasan

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis pengaruh variabel *intergovernmental revenue* (X_1) terhadap variabel kinerja keuangan (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,464678$ ($df = 99 - 3 = 96$; $t_{tabel} = 1,98498$); ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dengan tingkat level signifikan $0,0005 < 0,05$, dengan nilai koefisien sebesar 0,000922, akibatnya hipotesis satu (H_1) diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan. *Intergovernmental revenue* atau dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan realisasi anggaran kepada pemerintah pusat. Semakin besar dana perimbangan yang diterima, maka pengawasan dari pemerintah pusat akan semakin ketat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Satria dan Sari (2018) dengan hasil bahwa *intergovernmental revenue* secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota Lhokseumawe. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dasmar dkk (2020) dengan hasil bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Riau. Hal ini menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis pengaruh variabel kekayaan pemerintah daerah (X_2) terhadap variabel kinerja keuangan (Y) diperoleh nilai $t_{hitung} = 4,93679$ ($df = 99 - 3 = 96$; $t_{tabel} = 1,98498$); ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dengan tingkat level signifikan $0,0000 < 0,05$, dengan nilai koefisiensi sebesar $-0,007886$, akibatnya hipotesis dua (H_2) diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan.

Kekayaan pemerintah daerah dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangannya dikarenakan kekayaan daerah yang besar dapat membuat daerah tersebut tergantung pada sumber daya alam, sehingga mengabaikan sektor-sektor lain yang berpotensi. Selain itu, kekayaan daerah yang besar dapat memicu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga mengurangi efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam jangka panjang, kekayaan daerah yang besar dapat menjadi bencana bagi daerah tersebut, karena dapat membuat daerah tersebut tergantung pada sumber daya alam dan kurang berinovasi dalam mengembangkan ekonomi daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armaja dkk (2015) dengan hasil kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dasmar dkk (2020) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Riau. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* dan Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil analisis pengaruh variabel *intergovernmental revenue* (X_1) dan kekayaan pemerintah daerah (X_2) terhadap variabel kinerja keuangan (Y) diperoleh nilai $F_{hitung} = 875,8467$ ($df = 99 - 3 = 96$; $F_{tabel} = 3,09$); ($F_{hitung} > F_{tabel}$), dengan tingkat level signifikan $0,0000 < 0,05$, akibatnya hipotesis tiga (H_3) diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *intergovernmental revenue* dan kekayaan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan. Peningkatan pendapatan dari dana perimbangan dan kekayaan daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah secara bersamaan, hal ini dapat mengurangi resiko keuangan daerah saat menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pengelolaan kekayaan daerah yang efektif dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana perimbangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armaja dkk (2015) dengan hasil bahwa kekayaan daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hal serupa juga dikemukakan oleh Dasmar dkk (2020) dengan hasil bahwa kekayaan daerah dan *intergovernmental revenue* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di Riau. Hal ini menunjukkan bahwa *intergovernmental revenue* dan kekayaan pemerintah daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa secara parsial variabel *intergovernmental revenue* (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana yang diterima dari pemerintah pusat atau provinsi, maka semakin baik pula kinerja keuangan daerah, karena dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Sebaliknya, variabel kekayaan pemerintah daerah (X2) secara parsial justru menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya nilai aset atau kekayaan daerah belum tentu mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan, kemungkinan disebabkan oleh rendahnya produktivitas aset atau kurang optimalnya pengelolaan kekayaan tersebut. Secara simultan, kedua variabel yaitu *intergovernmental revenue* dan kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, yang menunjukkan bahwa kombinasi antara penerimaan dari pemerintah pusat dan kapasitas kekayaan daerah bersama-sama mempengaruhi bagaimana kinerja keuangan suatu daerah terbentuk.

5. Daftar Pustaka

- Achmad, Abu, Ratna Septiyanti, and Mega Metalia. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue, dan Hasil Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2017: 1-14.
- Armaja, Ridwan Ibrahim, and Aliamin. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2015: 171-172.
- Armaja, Ridwan Ibrahim, and Aliamin. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2015: 168-181.
- Basuki, Agus Tri, and Nano Prawoto. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- BPK RI. *JDIH BPK RI*. October 02, 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> (accessed April 2, 2024).
- Dasmar, Taufik, and Y M, Indrawati, Novita Basri. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Al Iqtishad*, 2020: 51-52.

- Dasmar, Taufik, Yesi Mutia Basri, and Novita Indrawati. "Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurnal Al Iqtishad*, 2020: 39-56.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Iswantini, Dwi Agustina, Agung Hirmantono, and Rita Natalia. "Pajak Daerah, Intergovernmental Revenue dan Kemakmuran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Lamongan)." *Jurnal ITB Ahmad Dahlan Lamongan*, 2021: 41-42.
- Jessica, Novertasya, and Sugi Suhartono. "Pengaruh Intergovernmental Revenue, Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan Daerah, dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris : Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2018)." *Akuntansi Keuangan*, 2020: 19.
- Lisaria, Putri Rumanintya. "Analisis Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar." *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2021: 3.
- M.Nafarin. "Penganggaran Perusahaan." 11. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Meylinda, D Darwis, and Suaidah. "Pengukuran Kinerja Laporan Keuangan Menggunakan Analisis Rasio Profitabilitas Pada Perusahaan Go Public." *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi (JIMASIA)*, 2022: 20.
- Mujiyani, and A P Salma. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dengan Metode Economic Value Added Dan Market Value Added Pada Pt.Indosat, Tbk Dan Pt.Axiata Tbk (Periode Tahun 2016-2021)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2023: 105.
- Nugroho, Tatas Ridho, and Novi Eko Prasetyo. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur." *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 2018: 31.
- Oki, Kamilaus Kostanse, Frederic W.Nalle, and Pricilia A.V.Meomanu. "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5 (Juni 2020).
- Patrick, Patricia A. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Ph.D dissertation, United States: The Pennsylvania State University, 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. "BPK RI." *Peraturan BPK*. May 15, 2006. file:///C:/Users/ACER/Downloads/Permen-No.13-2006.pdf (accessed April 25, 2024).
- Priyatno, Dwi. *Analisis Regresi Linier dengan Program SPSS dan Analisis Data Panel dengan Program Evies*. Yogyakarta: Harapan Cahaya, 2022.
- Putri, Ni Kadek Novia Indrawati, and Ni Putu Ayu Darmayanti. "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali." *E-Jurnal Manajemen*, 2019: 2854-2855.
- Putri, Rumanintya Lisaria. "Analisis Kinerja Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar." *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2021: 3.

- Rahayu, YKF, AE Sarwono, and Sunarti. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2014-2018." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknoogi Informasi*, 2019: 445.
- Rengganis, O, R, M Valianti, and Oktariansyah. "Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung." *Jurnal Mediasi*, 2020: 119-120.
- Rokhayah, Siti. *Hak Cipta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara @2021 Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat - Gedung Syafruddin Prawiranegara / Lt.12 Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta. July 14, 2020.* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/13250/Menilai-Barang-Milik-Daerah-Sekaya-Apa-Daerahmu.html> (accessed April 2, 2024).
- Sadek, Sefhvira Chilly Bella Tiara, and Eny Kusumawati. "Pengaruh Leverage, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pusat, Temuan Audit BPK, Pendapatan Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Journal of Social Science Research*, 2024: 9081-9100.
- Satria, Dy Ilham, and Heny Puspita Sari. "Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage, dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe)." *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh*, 2018: 9-21.
- Suhardjanto, Djoko, Mandasari Rusmin, Putriesti, and Alistair Brown. "Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities." *Journal Public Policy*, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.33 TAHUN. "JDIH BPK RI." *Peraturan BPK*. October 15, 2004. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/UU%20Nomor%2033%20Tahun%202004.pdf> (accessed April 15, 2024).